

Daftar Pustaka

1. BUKU

- C.S.T. Kansil, 1980, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2017, Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek. Jakarta : Citra Aditya.
- Fred B.G. Tumbuan, 2018, PKPU Bukan Insolven, Perkembangan Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Hadiputranto, S. H., Sulaiman, S., & Tampubolon, A., 2010. Hukum Jaminan dan Fidusia di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Y., 2015, Segi-Segi Hukum Kepailitan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ishaq, 2009, Dasar-dasar Ilmu Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstitusi Press.
- Kasmir, 2014, Dasar-Dasar Perbankan (Edisi Revisi). Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, P. M, 2014, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana.
- Mochtar Kusumaatmadja, 2009, Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muchsin, M, 2003, Perlindungan Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: UI Press.
- Mulyadi, K, 2023, Pengantar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU): Teori, Praktik, dan Kasus-Kasus Nyata. Jakarta: Salemba Empat.
- M. Taufik, 2020, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki, 2010, “Penelitian Hukum”, Jakarta, Pranda Media,
- Philipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Rakyat di Indonesia: Surabaya Bina Ilmu
- Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, Bandung : 2000
- Subekti, 2001. Pokok-Pokok Hukum Perdata. Jakarta: Intermasa.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2010, Hukum Kepailitan. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Wesly Erikson Siahaan, 2025

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG KREDITOR SEPARATIS TERKAIT MASUKNYA INVESTOR BARU YANG MENGENYAMPINGKAN KEABSAHAN RAPAT KREDITUR (STUDI KASUS PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI NOMOR 6 PK/PDT.SUS-PAILIT/2015)

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S2 Hukum

[www.upnvj.ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Zulkifli, M, 2016, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Indonesia. Yogyakarta: UII Press.

2. JURNAL

Anita Afriani & Rai Mantili, 2017, Implementasi perdamaian (accord) pada Pengadilan Niaga dalam penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia, Jurnal, Universitas Padjajaran, Volume 2 Nomor 2

Hasdi Hariyadi, 2020. Restrukturisasi utang sebagai upaya pencegahan kepailitan pada perseroan terbatas. Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Lamadukelleng, Sengkang, Jurnal Hukum, Volume 1 Nomor 2

Iwan Erar Joesoef, “Penerapan Asas Action Paulina Kepailitan dan Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli yang beritikad baik (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm)”, Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 Nomor 1, Oktober 2023

Ishak, 2015, Upaya hukum debitor terhadap putusan pailit. *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 17 Nomor 1

Judistira Yusticia, Joni Emirzon dan Iza Rumesten RS, 2020, *Limitasi hak kreditor separatis atas pelunasan piutang setelah lampau waktu penjualan jaminan kebendaan dalam proses penyelesaian kepailitan di Pengadilan Niaga*. Lexlata, Volume 2 Nomor 1

Nana Syaodih, 2016, “*Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*”, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Pratama, A. Y, 2020, Perlindungan Hukum Kreditor Separatis dalam Proses PKPU terhadap Masuknya Investor Baru. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Volume 50 Nomor 2.

Rado Fridsel Leonardus dan Novitasari, 2020, Kedudukan hukum kreditur yang tidak terverifikasi dalam undang-undang kepailitan. *Jurnal Tera (Tata Hukum dan Peradilan)*, Vol 6 No 3

Rohendi, Acep, 2020. Perdamaian dalam kepailitan sebagai upaya penyelesaian utang piutang antara debitur dengan para kreditur. Jurnal Hukum dan Bisnis Universitas Pancasila, Vol 6 No 2

Yohannes Alexander Kenting, 2022, Kedudukan Kreditor Separatis terhadap Rencana Perdamaian dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. *Jurnal Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2*

3. SKRIPSI/TESIS/DISERTASI

Setiono, 2004, Rule of Law (Supremasi Hukum), Surakarta: Tesis, Universitas Sebelas Maret.

Megawati Prabowo, 2024, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor yang Tagihannya Ditolak Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Tesis, Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Titik Tejaningsih, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Separatis Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Disertasi, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

4. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

• Internet

<https://www.coursehero.com/file/p37p3nm/23-Definisi-Keadilan-Kepastian-dan-Kemanfaatan-Hukum-Keadilan-Hukum-Pengertian/> diakses tanggal 20 Februari 2018. Pukul 20.00.Wib.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/parate-eksekusi-cl1593/> diakses tanggal 20 Februari 2018. Pukul 22.00.Wib.